



***E-Government* dalam Mitigasi Potensi Konflik Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nunung Dwi Nugroho¹

¹Kantor Ketahanan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 22/01/2023

Direvisi 23/02/2023

Diterima 01/03/2023

Kata kunci:

E-government
Sidasiscam
Konflik Sosial
Mitigasi Konflik
Radikalisme

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kerentanan sosial budaya yang cukup mengkhawatirkan dan berpotensi konflik sosial. Menguatnya radikalisme dan intoleransi dalam masyarakat mendorong Pemerintah Daerah menciptakan early warning system dalam mengantisipasi terjadinya potensi konflik sosial di masyarakat. Melalui metode studi kasus, penulis mengkaji e-government untuk deteksi dini dan mitigasi potensi konflik, yaitu Sistem Informasi Update Data Potensi Konflik Berbasis Kecamatan (Sidasiscam). Aplikasi melayani operator di tingkat kecamatan menyampaikan update data potensi konflik di wilayahnya secara real time untuk merumuskan kebijakan yang cepat, efektif dan tepat sasaran. Minimnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi dan begitu dinamisnya rotasi kepegawaian membuat aplikasi ini kurang bisa maksimal dalam segi pemanfaatannya.

Abstract

The Special Region of Yogyakarta has quite worrying socio-cultural vulnerabilities and has the potential for social conflict. Strengthening radicalism and intolerance in society has encouraged the Regional Government to create an early warning system in anticipating potential social conflicts in society. Using the case study method, the authors examine e-government for early detection and mitigation of potential conflicts, namely the District-Based District-Based Potential Conflict Data Update Information System (Sidasiscam). The application serves operators at the sub-district level to deliver real-time updates on potential conflict data in their area to formulate policies that are fast, effective and on target. The lack of human resources who master information technology and the dynamic rotation of personnel make this application less optimal in terms of utilization.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nunung Dwi Nugroho

Kantor Ketahanan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Tentara Rakyat Mataram, No.45, Bumijo, Kec. Jetis, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: nunungdn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sebagai daerah multikultur yang dinaungi oleh beragam institusi pendidikan dan destinasi wisata, Daerah Istimewa Yogyakarta tak pelak menjadi *melting pot* dari beragam kepentingan dan ideologi. Sedikitnya ada 109 (seratus sembilan) perguruan tinggi baik negeri atau swasta di DIY, yang menjadi magnet bagi para pendatang dari penjuru negeri untuk mengenyam ilmu dan menjadi alasan untuk tinggal maupun menetap sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS, 2022). Sisi keragaman Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat dilihat dari komposisi pemeluk agamanya yang cukup kompleks. Data Badan Pusat Statistik DIY memperlihatkan adanya keberagaman, terkhusus pada sisi jumlah pemeluk agama yang terlihat dari data bahwa dari 3.675.299 orang pemeluk agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 92,88 persen diantaranya merupakan pemeluk agama Islam, 2,44 persen pemeluk agama Kristen Protestan, 4,51 persen pemeluk agama Katolik, 0,09 persen pemeluk agama Hindu, 0,08 persen pemeluk agama Budha, dan sisanya adalah pemeluk agama Konghuchu.

Kompleksnya entitas yang melingkupi Yogyakarta tak pelak menjadikan daerah ini sebagai daerah yang plural dan heterogen. Beragam etnis, suku bangsa, adat istiadat, budaya dan bahasa membaur dan mewarnai setiap sudut kehidupan di daerah ini. Kepelbagaian tersebut layaknya dua sisi mata uang, tentu bisa dilihat dan dimaknai sebagai suatu bentuk kekayaan sebuah bangsa, namun di lain sisi, apabila tidak dikelola dengan baik, maka suatu saat perbedaan yang ada dapat menjadi bumerang dan bermuara pada potensi konflik.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari resiko adanya keberagaman serta berkaca dari realita beberapa tahun terakhir, Yogyakarta juga ditempa beragam permasalahan terkait dengan intoleransi. Mendasarkan pada catatan pada tahun 2017 misalnya, cukup banyak kasus intoleransi yang terjadi di DIY. Sebut saja kasus pencabutan IMB sebuah gereja beraliran pentakosta di Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul; penolakan IMB kantor Gereja Kristen Jawa Klasis Gunungkidul, dan penolakan seorang Panewu (Camat) beragama Katolik di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Pada tahun 2020, Setara Institute mencatat bahwa terdapat 180 (seratus delapan puluh) peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama terjadi di Indonesia dan sebanyak 7 (tujuh) peristiwa pelanggaran terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lidwina, 2021). Keberagaman yang melingkupi Daerah Istimewa Yogyakarta acapkali harus dimaknai lebih dalam sebagai bentuk kewaspadaan akan potensi konflik yang bisa saja meledak apabila keberagaman tersebut tidak dikelola dengan apik, baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Sebagai implikasi negatif dari adanya keberagaman, radikalisme hingga saat ini masih relevan jika dianggap sebagai tantangan kebangsaan yang mengancam keharmonisan bangsa yang sewaktu-waktu bisa saja meledak menjadi sebuah konflik sosial di ranah masyarakat. Generasi muda yang digadang-gadang sebagai penerus keberlangsungan bangsa malah kini kian rentan terpapar paham radikalisme. Beberapa faktor menjadi pemicu, antara lain masih labilnya sisi psikologis karena masih mencari jati diri dan masifnya upaya pengkaderan oleh organisasi berpaham ekstrem dalam rangka regenerasi kepemimpinan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengemukakan, tantangan kian kuat jika melihat akan realita terjadinya bonus demografi yang dialami oleh Indonesia. Adanya bonus demografi, diprediksi oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bahwa kondisi masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 2030-2040 akan didominasi oleh usia produktif (usia 15-34 tahun). Di sisi lain, BNPT juga melihat pesatnya kemajuan teknologi yang sejalan dengan tingginya penggunaan media sosial dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk melancarkan kepentingan mereka khususnya dalam menjaring generasi

muda sebagai kader (BNPT, 2021). Fakta memperlihatkan bahwa akhir-akhir ini, terdapat sebuah fenomena keterlibatan generasi muda dalam aksi terorisme. Sebutlah aksi terorisme di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021, dilakukan oleh sepasang suami istri kelahiran tahun 1995 yang termasuk dalam generasi Z. Aksi penyerangan yang dilakukan di Mabes Polri pada tanggal 30 Maret 2021 juga dilakukan oleh seorang perempuan berusia 26 tahun yang diprediksi terpapar radikalisme melalui sosial media (Zulkarnaen, 2022). Maraknya keterlibatan generasi muda dalam aksi terorisme dan radikalisme tentu menjadi pekerjaan rumah yang cukup sulit bagi negeri ini. Ketahanan generasi muda agar tidak terpengaruh ideologi radikal tentu mutlak diperkuat. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan sebagai benteng pertahanan generasi muda dari geliat radikalisme adalah dari level keluarga dan institusi pendidikan. Di lain sisi, peran tokoh agama juga diperlukan dalam menyuarakan nilai-nilai moderasi beragama yakni antara lain adalah sikap saling menghormati, nilai-nilai perdamaian dan toleransi antar sesama manusia.

Penyebarluasan narasi tentang toleransi perlu digalakkan sebagai bentuk perlawanan terhadap benih-benih intoleransi yang muncul di sekitar kita. Semangat empati dan pengertian antar anggota masyarakat perlu dibangun dan diperkuat sebagai langkah tegas dalam melawan paham radikalisme seraya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Media sosial sebagai salah satu pintu gerbang radikalisme perlu dijejali dengan beragam konten kontra narasi melawan intoleransi. Salah satu akibat yang bisa saja terjadi sebagai resiko dari keberagaman adalah potensi timbulnya konflik dan kerawanan lain di masyarakat. Pada dimensi sosial budaya, konflik bisa saja sewaktu-waktu terjadi saat relasi sosial antar kelompok masyarakat semakin renggang. Terlebih apabila ditambah munculnya bentuk eksklusivitas kelompok-kelompok masyarakat tertentu, *stereotype* atau label negatif terhadap kelompok tertentu, hingga minimnya level penerimaan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda baik suku, agama atau kepercayaannya. Terkait hal itu, maka salah satu hal krusial yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan ketenteraman sosial di masyarakat adalah perlunya peningkatan upaya antisipatif dan mitigasi potensi konflik di masyarakat. Begitupun dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi kerawanan cukup tinggi, perlu berbenah dan mengantisipasi terjadinya potensi konflik. Lalu bagaimana kiat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mitigasi potensi konflik di daerah sebagai efek negatif dari radikalisme dan intoleransi? Pertanyaan demikianlah yang akan coba penulis jawab melalui tulisan ini.

Realita belenggu radikalisme sungguh mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai demi keberlanjutan bangsa yang berbhinneka ini. Munculnya beragam tindak kekerasan di masyarakat yang dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, mengindikasikan masih maraknya paham radikalisme di sekitar kita. Selain masih adanya tindak kekerasan, tindakan main hakim sendiri, maupun tindak anarkis dalam menyikapi beragam perbedaan di masyarakat merupakan realita yang tidak terelakkan.

Kartodirdjo (1985) menjelaskan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang ada dan ditandai oleh adanya suatu kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan berseberangan pendapat dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang sedang berkuasa. Radikalisme dimaknai sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan secara masif dan drastis. Radikalisme adalah suatu ancaman bagi keamanan dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Berdasarkan pada sejarah yang ada, radikalisme dapat mendorong timbulnya konflik sosial, baik secara vertikal maupun horizontal (Imran, 2020).

Dalam kehidupan beragama, gerakan radikalisme berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pernyataan tersebut, antara lain adalah bahwa (1) radikalisme berpotensi mengganti ideologi negara dengan ideologi kelompok tersebut, (2) membawa suatu keresahan sosial karena sifatnya yang keras, cenderung anarkis, dan militan, (3) dampak jangka panjang dari radikalisme adalah dapat mengancam keberadaan dan eksistensi para elit penguasa negeri.

Di sisi lain, intoleransi menjadi hal krusial yang juga layak menjadi perhatian khalayak. Adapun penyebab terjadinya intoleransi di masyarakat, khususnya pada kalangan generasi muda disebabkan oleh beragam alasan, antara lain (1) belum matangnya sisi mentalitas pada remaja sehingga mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain yang dianggap lebih pintar, lebih tua, serta lebih “berkuasa” dalam hal keagamaan. Mereka juga masih mencari “mercusuar” yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. (2) Adanya suatu ketimpangan yang menyebabkan terkendalanya akses kaum muda secara politis untuk mendapat hak-haknya. Hal ini menimbulkan suatu kekecewaan kepada negara. (3) adanya ketimpangan ekonomi yang sering ditengarai sebagai alasan paling kuat dalam melandasi munculnya kekerasan dan intoleransi. Dilandasi rasa bosan karena selalu “hidup susah” akhirnya beberapa diantara mereka terpengaruh bujuk rayu dari seseorang atau sekelompok orang agar muncul bibit-bibit kebencian.

Maraknya radikalisme dan intoleransi di kalangan masyarakat tak pelak dapat memicu timbulnya gesekan di masyarakat yang apabila tidak diantisipasi sedemikian rupa dapat berakibat pada timbulnya potensi konflik sosial di masyarakat. Adapun konflik sosial dimaknai oleh Soerjono Soekanto sebagai proses sosial dimana seorang individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai oleh suatu ancaman atau kekerasan (Damsar, 2010). Konflik sosial juga merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antara pihak satu dengan pihak lain yang ada di dalam masyarakat, acapkali ditandai dengan adanya perlawanan, penekanan hingga bisa saja saling menghancurkan. Perbedaan kepentingan menjadi salah satu penyebab konflik sosial yang masif. Kepentingan tersebut baik politik, ekonomi dan perebutan sumber daya lain acapkali menjadi alasan utama terjadinya konflik sosial. Pemerintah sebagai aktor utama yang berperan dalamantisipasi dan mitigasi potensi konflik di masyarakat wajib bergerak untuk meminimalisir terjadinya potensi konflik dengan melakukan upaya-upaya terpadu dan bersinergi dengan pemangku kebijakan lainnya.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena penulis rasa dapat mengelaborasi dan mengeksplor suatu kasus secara lebih mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian studi kasus ini, peneliti menggunakan penelitian studi kasus tunggal. Peneliti menyajikan uji kritis suatu teori yang signifikan dalam rancangan studi kasus tunggal tersebut. Pemilihan studi kasus tunggal disini berdasarkan pada tujuan penelitian yang berusaha mendeskripsikan data-data dari subjek penelitian yaitu para pejabat struktural dan staf di lingkup Pemerintah Daerah DIY serta para operator aplikasi Sistem Update Data Potensi Konflik Berbasis Kecamatan (Sidasiscam). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus tunggal karena penelitian ini menggunakan satu objek/kasus di satu tempat penelitian, analisisnya meliputi proses pengenalan aplikasi Sidasiscam sebagai bentuk *e-government*, implementasi dan *monitoring* pelaksanaan pelaporan potensi konflik melalui aplikasi Sidasiscam. Dalam penelitian ini, peneliti juga telah mengumpulkan data melalui berbagai narasumber serta berbagai sumber pustaka tentang aplikasi Sidasiscam. Studi kasus yang dilakukan juga bersifat eksploratif, karena objek yang ditelaah hanya mencerminkan dirinya sendiri secaa

detail untuk mendapat gambaran yang menyeluruh dari suatu objek, dalam hal ini aplikasi Sidasiscam (Yunus, 2010). Dalam hal ini, peneliti tak hanya memahami kasus dari bagian luarnya semata, namun juga melihat dari dalam secara detail, yang membuat salah satu teknik pengumpulan datanya melalui interview yang mendalam dengan berbagai narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan E-government dalam mitigasi konflik sosial di Yogyakarta

Dilaksanakannya reformasi birokrasi di dalam tubuh pemerintahan yang dilandasi oleh adanya harapan akan terbentuknya sistem pemerintahan yang transparan, bersih dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efisien dan tepat sasaran, mewujudkan suatu percepatan penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan dan akuntabel yang sering dimaknai sebagai *E-government*. *E-government* sendiri merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. *E-government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, hal utama dalam pengertian *e-government*, adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai medianya. Selain itu, *e-government* dapat dilihat dari tujuan pemanfaatannya, yang menyebabkan pemerintahan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Ketersediaan informasi yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, tentu akan membuat sistem pemerintahan menjadi lebih baik.

Beragam hal telah dilakukan sebagai upaya menanggulangi bergulirnya paham radikalisme dan intoleransi di kalangan masyarakat, karena jika dibiarkan, masalah intoleransi dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, telah menerbitkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Konflik Sosial. Regulasi ini diterbitkan sebagai langkah strategis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayah DIY sekaligus sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat akan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas.

Adapun isi dari instruksi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota tersebut antara lain adalah:

Pertama, melakukan upaya-upaya pencegahan praktik diskriminasi dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati serta menjaga kerukunan hidup beragama dan aliran kepercayaan.

Kedua, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan intoleran dan/atau potensi konflik sosial, guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.

Adapun instruksi gubernur tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kejadian yang menyebabkan munculnya potensi konflik di DIY, khususnya saat adanya kasus dimana seorang warga masyarakat bernama Slamet Jumiarto beserta keluarganya ditolak untuk tinggal di Padukuhan Karet, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, hanya karena Slamet dan keluarganya memeluk agama Kristen.

Dalam upaya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menggelar serangkaian kegiatan yang menyasar pada masyarakat, pelajar dan mahasiswa. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Daerah DIY berhasil menggelar sejumlah 60 (enam puluh) kali kegiatan *Sinau Bhinneka Tunggal Ika* bekerjasama dengan Yayasan Satunama Yogyakarta. Kegiatan ini digelar secara masif dan menyeluruh di 5

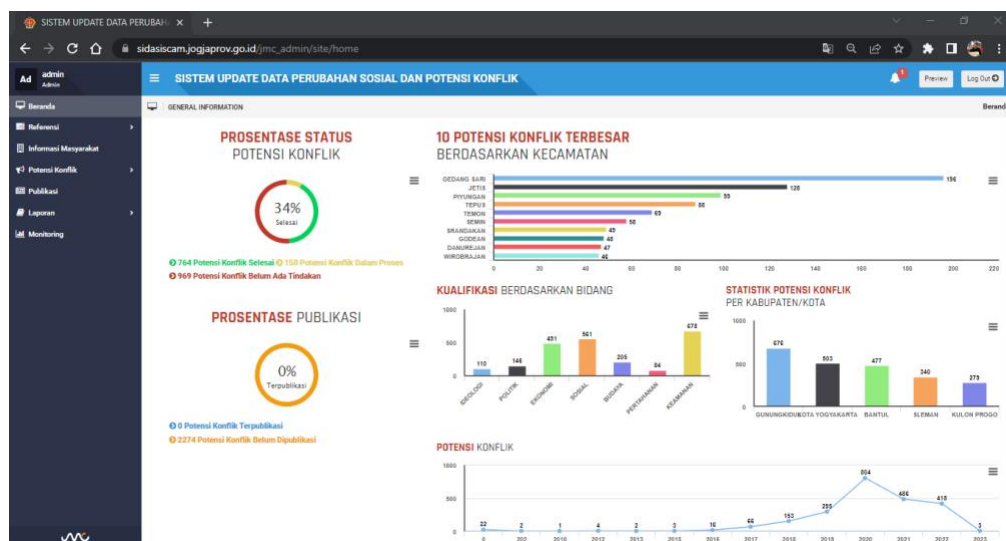
kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggandeng Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V DIY. Senada dengan kegiatan *Sinau Bhinneka Tunggal Ika*, kegiatan *Sinau Pancasila* yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY juga telah diselenggarakan. Menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama, beragam akademisi dan praktisi, kegiatan ini digelar sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali di seluruh kapanewon se-DIY dan ditambah puluhan kali kegiatan berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Selain kegiatan inti diatas, Pemerintah Daerah DIY juga menggandeng beragam forum kemitraan di masyarakat yang menjadi ujung tombak Pemerintah Daerah DIY dalam menangkal radikalisme dan intoleransi sebagai bagian dari cegah dini potensi konflik di masyarakat. Forum Kemitraan tersebut antara lain adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DIY dan Jaga Warga. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, beragam forum kemitraan ini memiliki kewajiban dan andil dalam deteksi dini dan cegah dini potensi konflik di masyarakat.

3.2 Aplikasi Sidasiscam dalam mitigasi konflik sosial di Yogyakarta

Sebagai upaya percepatan dalam cegah dini dan deteksi dini potensi konflik sebagai imbas maraknya radikalisme dan intoleransi, pada tahun 2018 Pemerintah Daerah DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menginisiasi adanya pelaporan terstruktur potensi konflik di daerah secara terintegrasi melalui hadirnya aplikasi Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik Berbasis Kecamatan (*Sidasiscam*) yang bekerjasama dengan kapanewon/kemantren (kecamatan) se-DIY. Oleh Pemerintah Daerah DIY, setiap operator di level kecamatan dibekali sarana prasarana dan kapabilitas untuk melaporkan secara cepat beragam konflik sosial di lapangan melalui aplikasi yang dapat diakses melalui laman <http://sidasiscam.jogjaprov.go.id/>. Saat ini, aplikasi Sidasiscam berada dalam koordinasi Sub Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.

Melalui adanya aplikasi Sidasiscam, setiap operator di level kecamatan diberi ruang dan akses untuk memberikan laporan potensi konflik secara *real time*, cepat, menyeluruh dan lengkap kepada pemerintah daerah agar bisa menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan efisien.



Gambar 1. Tampilan utama aplikasi Sidasiscam

Melalui sistem pelaporan terpadu ini, operator di level kecamatan diberikan kesempatan secara komprehensif untuk melaporkan beragam informasi potensi konflik, khususnya yang terkait aspek budaya, ekonomi, ideologi, keamanan, pertahanan, politik dan sosial. Oleh operator di tingkat kabupaten yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota, informasi yang disampaikan oleh pihak kecamatan diolah, diverifikasi dan menjadi bahan pengambilan kebijakan awal sebagai langkah antisipasi potensi konflik.

No	Aksi	Bidang	Potensi Konflik	Waktu Kejadian	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Detail Lokasi
1	Pilih Aksi	Sosial	Dua kubu kepemimpinan PSHT Piyungan	10 Jan 2023 - 11:10	Kabupaten Bantul	Piyungan	Polsek Piyungan
2	Pilih Aksi	Keamanan	Konvoi Harlah PPP	08 Jan 2023 - 09:00	Kota Yogyakarta	Kotagede	Tikum Lapangan Karang menuju ke Stadion Kridosono
3	Pilih Aksi	Sosial	Keramaian Nataru	01 Jan 2023 - 08:43	Kota Yogyakarta	Kotagede	Gereja Kristen Jawa Depokan Prenggan
4	Pilih Aksi	-	Tidak ada potensi konflik.	Jan 2023	Kota Yogyakarta	Mergangsan	-
5	Pilih Aksi	-	Tidak ada potensi konflik.	Jan 2023	Kabupaten Sleman	Sleman	-
6	Pilih Aksi	Keamanan	Nihil	31 Des 2022 - 21:53	Kabupaten Bantul	Kretek	-
7	Pilih Aksi	Keamanan	Nihil	31 Des 2022 - 15:13	Kabupaten Bantul	Pundong	Nihil
8	Pilih Aksi	Budaya	NIHIL	30 Des 2022 - 14:02	Kabupaten Gunungkidul	Gedang sari	NIHIL
9	Pilih Aksi	Ekonomi	Konflik warga Karangploso, atas pendirian touwer telkomsel di Karangploso	26 Des 2022 - 07:09	Kabupaten Bantul	Piyungan	Kominfo Kab. Bantul Pemda
10	Pilih Aksi	Sosial	kenaikan Harga Sembako menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru	23 Des 2022 - 08:59	Kabupaten Bantul	Banguntapan	Wilayah Kapanewon Banguntapan
11	Pilih Aksi	Ekonomi	Konflik warga atas pembangunan touwer telkomsel di Dusun Karangploso, Sitimulyo, Piyungan	22 Des 2022 - 15:11	Kabupaten Bantul	Piyungan	RT. 04, Karangploso, Sitimulyo, Piyungan
12	Pilih Aksi	Keamanan	NIHIL	12 Des 2022 - 21:27	Kota Yogyakarta	Kotagede	NIHIL
13	Pilih Aksi	Ekonomi	Adanya Event Tugu Jogja Expo di Jl. Margoutomo no.10 Gowongan Kemantren Jetis yang berada di kawasan Sumbu Filosofi	08 Des 2022 - 00:39	Kota Yogyakarta	Jetis	-
14	Pilih Aksi	Sosial	terdapat laporan warga tentang tanaman (media pot) mengganggu dan menutupi trotoar di jl Mas Suharto depan SMP Bobkti.	08 Des 2022 - 12:19	Kota Yogyakarta	Danurejan	jl Mas Suharto no 41
15	Pilih Aksi	Keamanan	Rumah rusak akibat angin puting beliung	05 Des 2022 - 12:00	Kabupaten Gunungkidul	Purwosari	di Pedukuhan Ploso Kalurahan Giritirto
16	Pilih Aksi	Sosial	Dampak pembangunan gedung toko Fortuna di Jl. Suryotomo terhadap warga di sekitarnya	05 Des 2022 - 07:53	Kota Yogyakarta	Gondomanan	Jl. Mayor Suryotomo No.14, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122
17	Pilih Aksi	-	Tidak ada potensi konflik.	Des 2022	Kota Yogyakarta	Gondokusuman	-

Gambar 2. Daftar potensi konflik yang disampaikan oleh operator level kecamatan

Langkah verifikasi data oleh Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota untuk setiap potensi konflik yang diunggah oleh operator di level kecamatan dimaknai sebagai rantai kegiatan penanggulangan konflik yang semakin lengkap karena mencakup keseluruhan elemen yang ada, yakni level kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Dengan demikian, sangat besar harapan untuk terwujudnya hubungan sinergis dan dinamis yang lebih berkarakter antar seluruh elemen pemerintahan di DIY dalam menyongsong peradaban baru yang aman, nyaman dan menjunjung tinggi kebhinekaan.

Secara umum, informasi yang disampaikan oleh operator kecamatan melalui aplikasi Sidasiscam telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah DIY sebagai bentuk deteksi dini potensi konflik di masyarakat, walau belum sepenuhnya optimal. Beragam informasi yang diperoleh, dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi bentuk kewaspadaan dini daerah dalam mengantisipasi pecahnya konflik baik vertikal maupun horizontal di masyarakat DIY. Apabila penanganan di level desa, kecamatan maupun kabupaten belum bisa optimal dalam meminimalisir konflik, maka kebijakan di level provinsi yang akan diterbitkan sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam memecahkan problematika di masyarakat. Dari aplikasi ini, diperoleh pula rekapitulasi potensi konflik se-Daerah Istimewa Yogyakarta, 10 (sepuluh) potensi konflik terbesar, statistik potensi konflik per kabupaten/kota, dan progres potensi konflik di tingkat kecamatan.

Fungsi koordinasi yang disematkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi krusial karena berperan layaknya penghubung antar pemangku kepentingan terkait yang memiliki relasi dalam kasus yang berpotensi konflik tersebut. Apabila diperlukan tindak lanjut dalam upaya memecahkan permasalahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

akan melakukan koordinasi dan pemantauan bersama dengan pemangku kebijakan lain sebagai langkah antisipatif dan deteksi dini potensi konflik ke lapangan.

Permasalahan yang diangkat dalam aplikasi Sidasiscam akan terus dipantau baik oleh pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. Rencana aksi, progres penyelesaian permasalahan dan bentuk penanganan menjadi hal krusial yang selalu dimonitor oleh pemerintah dan disampaikan pula secara detail melalui aplikasi Sidasiscam ini. Pola-pola koordinasi juga menjadi bagian penting dalam aplikasi Sidasiscam. Pemaparan terkait peran pihak-pihak terkait khususnya Jaga Warga juga diperlihatkan dalam setiap informasi yang diunggah yang menunjukkan perlunya kolaborasi dan relasi antar sektor terkait dalam penanganan tiap permasalahan. Dalam rangka monitoring dan evaluasi, tiap tiga bulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY melaksanakan rapat koordinasi dengan semua operator tingkat kecamatan dan dihadiri pula oleh pemangku kepentingan terkait dalam rangka pemantauan dan tindak lanjut.

Namun tak lekang dari kendala, aplikasi ini juga masih menuai beragam tantangan. Informasi yang tersampaikan melalui aplikasi Sidasiscam acapkali belum detail sehingga masih diperlukan adanya konfirmasi ulang kepada pihak kecamatan. Informasi yang kurang lengkap dan kurang akurat ini tentu akan berimbas pada lambannya pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan. Penguasaan teknologi informasi oleh tenaga teknis di kecamatan, khususnya dalam menjalankan aplikasi menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya sumber daya manusia di instansi level kecamatan acapkali menjadi problematika mendasar yang dialami oleh operator. Masih minimnya tenaga-tenaga muda dan cekatan seringkali menjadi hambatan yang dialami oleh pihak kecamatan saat hendak mengirimkan laporan melalui aplikasi. Sehingga kadangkala laporan tertunda dan tidak segera dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Rotasi kepegawaian di tingkat kecamatan juga amatlah dinamis. Namun rotasi kepegawaian tersebut sayangnya tidak diimbangi dengan informasi pergantian operator yang seharusnya dilaporkan ke pemerintah daerah yang pada muaranya akan dilakukan pergantian Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol DIY terkait pergantian personel operator di level kecamatan. Adanya rotasi kepegawaian juga seringkali tidak disertai dengan transfer pengetahuan terkait penginputan data kepada pegawai baru yang dibebani pekerjaan sebagai anggota tim, sehingga operator yang baru mengalami kesulitan dalam penginputan laporan. Permasalahan lain acapkali muncul saat operator di kecamatan tidak menyimpan informasi dasar (alamat laman aplikasi, *username* dan kata sandi) aplikasi dengan baik, sehingga berimbas pada keterlambatan pelaporan yang seharusnya dapat dilaporkan secara *real time*.

Pembangunan aplikasi Sidasiscam merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menanggulangi potensi konflik di DIY. Melalui penerapan konsep e-government, Pemerintah Daerah DIY berupaya memitigasi potensi konflik di level kecamatan secara lebih efektif dan efisien. Pemetaan dilakukan berdasarkan kondisi sosial budaya tiap kecamatan. Dengan pembangunan aplikasi ini, pemerintah daerah akan mendapatkan data perubahan sosial secara *real time*. Berdasarkan data perubahan sosial, pemerintah dapat memonitoring status dan melakukan evaluasi terhadap daerah rawan konflik beserta upaya pencegahannya. Namun tak lepas dari kekurangan, aplikasi ini masih perlu diperbarui agar *user interface* maupun fungsi dan kemanfaatannya dapat berjalan makin baik, seiring dengan perbaikan sumber daya manusia pengelolanya baik di level kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi.

4. SIMPULAN

Pembuatan dan penerapan aplikasi Sidasiscam sebagai bagian dari pengembangan E-government di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menawarkan kecepatan dan

ketepatan dalam melakukan identifikasi dan mitigasi potensi kerawanan konflik sosial dalam masyarakat. Aplikasi ini sangat membantu mengingat keberagaman masyarakat dan transformasi sosial DIY sebagai kota pelajar, kota budaya dan kota tujuan wisata di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, penerapana aplikasi E-government memerlukan tidak saja kecanggihan teknologi perangkat lunak dan keras melainkan juga sumber daya manusianya. Kecakapan pegawai pemerintah daerah khususnya di tingkat kecamatan yang berperan sebagai operator utama aplikasi sidasicam ini masih memerlukan pelatihan untuk menjaga kemampuannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- BNPT. (2021). Cegah Paham Radikalisme Pada Anak Muda. <https://www.bnpt.go.id/cegah-paham-radikalisme-pada-anak-muda-kepala-bnpt-peran-pendidikan-dari-keluarga-merupakan-pertahanan-utama> diunduh pada Selasa, 17 Januari 2023
- BPS DIY. (2022). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022*. Yogyakarta: BPS DIY.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Kartodirdjo, S. (1985). *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan
- Lidwina, A. (2021). 10 Provinsi dengan Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak di Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/08/pelanggaran-kebebasan-beragama-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat> diunduh pada Senin, 28 November 2022
- Tahir, I., & Tahir, I. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 74-83.
- Sabari, H. Y. (2010). Metodologi penelitian wilayah kontemporer. *Pustaka Pelajar*.
- Zulkarnaen, I. (2022). Telaah - Kerawanan Generasi Muda Terpapar Radikalisme dan Pencegahannya. <https://kaltara.antarane.ws.com/berita/497653/telaah--kerawanan-generasi-muda-terpapar-radikalisme-dan-pencegahannya> diunduh pada Selasa, 17 Januari 2023